

Good Corporate Governance dan Kinerja BUMN Dengan Penghindaran Pajak Sebagai Pemoderasi

Handy Deo Setiadi dan Supatmi Supatmi

*Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
Jl Diponegoro No 52-60, Salatiga, 50711, Indonesia*

Info Artikel

Keywords:
company Performance, Corporate Governance, and Tax Avoidance

Kata Kunci:
Kinerja Perusahaan Penghindaran Pajak, dan Tata kelola perusahaan.

*ISSN (print): 2598-7763
ISSN (online): 2598-7771*

✉ Corresponding Author:
Supatmi
Tel./Fax.
E-mail:
supatmi.supatmi@uksw.edu



Abstract

Privatization is one of the Government's efforts to obtain additional capital with one of This study aims to analyze the impact of GCG on company performance with tax avoidance as a moderation variable. The GCG indicators in this research are independent board of commissioners, institutional ownership, audit quality, and proportion of the number of audit committees while company performance is proxied by return on assets. The sample in this research was 13 state-owned companies listed on the Indonesia Stock Exchange for 2016 to 2020. This research used cross-section weights methods for the hypothesis testing. The results of this research show that the audit quality and the proportion of the audit committee have a positive effect on the company's performance, while independent commissioners and institutional ownership have no effect on company performance. This study also finds that tax avoidance is proven only as a moderator by strengthening the positive influence of GCG as measured by institutional ownership on company performance.

Citation: Setiadi, H.D., dan Supatmi, S. (2021), Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja BUMN Dengan Penghindaran Pajak Sebagai Pemoderasi. AFRE Accounting and Financial Review, 4(2): 233-244

Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak GCG terhadap kinerja perusahaan dengan penghindaran pajak sebagai variabel pemoderasi. Indikator GCG dalam penelitian ini yaitu dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kualitas audit, dan proporsi jumlah komite audit sedangkan kinerja perusahaan diprosikan dengan return on assets. Sampel pada penelitian ini adalah 13 perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Penelitian ini menggunakan teknik analisis cross-section weights untuk pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit dan proporsi komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan sedangkan dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa penghindaran pajak hanya memperkuat pengaruh positif GCG yang diukur dengan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan.

*JEL Classification: G38, H26
DOI: <https://doi.org/10.26905/afr.v4i2.6689>*

1. Pendahuluan

Kinerja perusahaan adalah suatu hasil dari proses aktivitas perusahaan yang dapat dilihat melalui beberapa tolak ukur pada laporan keuangan perusahaan dan menjadikan faktor yang menunjukkan keefektifan suatu perusahaan dalam mencapai visinya. Kinerja perusahaan yang baik dapat

menentukan prospek perusahaan kedepan sehingga perusahaan dengan kinerja yang baik dapat membuat para investor untuk menanamkan modalnya (Fiyati & Noegroho, 2021). Oleh karena itu, untuk me-narik para investor perlu *good corporate governance* yang dapat membuat kebijakan sesuai

dengan kebutuhan perusahaan sehingga membuat kinerja perusahaan meningkat (Hapsari, 2019).

Menurut Rimardhani *et al* (2018) GCG adalah sistem yang mengendalikan perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan namun tetap mementingkan para *stakeholder* dalam mencapai visi perusahaan. GCG memiliki tujuan meningkatkan kinerja dan kontrol perusahaan. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan GCG perlu instrumen yang dapat mengontrol kebijakan perusahaan. Selain itu, penerapan GCG yang baik juga dapat terlihat dari cara perusahaan untuk menyeimbangkan antar pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda dan bisa meminimalisir konflik keagenan antara pihak manajemen dan pihak lain yang mempunyai tujuan berbeda (Sulastri & Hakip, 2017). Konflik keagenan yang dapat di-minimalisir tentunya dapat memberikan dampak yang baik bagi performa perusahaan.

Hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai GCG terhadap performa perusahaan sangat bervariasi. Widagdo dan Chariri (2014) pada perusahaan non keuangan di Indonesia, menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang dapat dilihat melalui nominal laba per saham. Sementara itu, indikator GCG lainnya yaitu proporsi saham yang dimiliki manajer, jumlah rapat komite, jumlah rapat dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Putri dan Muid (2017) membuktikan bahwa intensitas rapat dewan komisaris beserta besaran dewan komisaris memiliki dampak positif pada performa perusahaan, sedangkan terdapat dampak negatif antara dewan komisaris independen dengan performa perusahaan yang ditinjau melalui profitabilitas (ROA dan ROE). Markonah *et al* (2016) menemukan GCG yang diukur dengan *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) memberikan pengaruh positif pada performa perusahaan yang dilihat berdasarkan ROA dan ROE pada perbankan yang terdaftar di BEI 2010–2014. Sebaliknya, Al-ahdal *et al* (2020) dalam penelitiannya pada perusahaan non keuangan di India yang tergabung dalam *Gulf Cooperation Council* (GCC) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara GCG dan kinerja perusahaan yang diukur menggunakan ROE dan Tobin's.

Inkonsistensi hasil penelitian pengaruh GCG terhadap kinerja perusahaan dapat dijelaskan oleh perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak digunakan sebagai vari-

abel pemoderasi dalam hubungan kausal antara GCG dan performa perusahaan. Praktik GCG yang baik dapat membuat kinerja perusahaan meningkat. Namun, pengaruh tersebut akan melemah ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak. Meskipun peraturan perpajakan menganggap penghindaran pajak legal, praktik penghindaran pajak tidak didukung oleh pemerintah (Darmawan & Surakartha, 2014). Penghindaran pajak merupakan praktik yang berisiko jika terdeteksi otoritas fiskal karena dapat menyebabkan hukuman, terhentinya peningkatan kewajiban pajak, dan rusaknya citra perusahaan (Hanlon & Slemrod, 2009). Penghindaran pajak juga tidak selalu mendapat respon baik dari para investor (Desai & Dharmapala, 2009). Penghindaran pajak menjadikan peluang bagi manajer untuk melakukan tindakan oportunistik dan mengakibatkan masalah keagenan yang menyebabkan kinerja perusahaan menurun. Oleh karena itu, penghindaran pajak akan memperlemah pengaruh positif GCG terhadap kinerja perusahaan.

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga tidak lepas dari tindakan penghindaran pajak, salah satunya adalah perusahaan BUMN yang diduga melakukan upaya penghindaran pajak yaitu PT. Krakatau Steel (Tbk) yang merupakan perusahaan BUMN yang diduga melakukan penghindaran pajak. Anggota Komisi VII DPR menyebut ada potensi kerugian negara mencapai Rp10 triliun, praktik penghindaran pajak ini menggunakan modus memberikan cap baja impor dengan merek Krakatau Steel, baja tersebut hasil import dari Cina dan tidak diproduksi dalam negeri (Wicaksono, 2021). Pada tahun 2012 PT Perusahaan Gas Negara, Tbk terkena kasus sengketa pajak tentang perbedaan penafsiran ketentuan pajak yang berkaitan dengan kewajiban pemungutan PPN atas penyerahan gas dan bumi PMK-252/PMK.011/2012. Kemudian, pada tahun 2013 PT Perusahaan Gas Negara, Tbk didapati kasus sengketa mengenai perbedaan pemahaman atas tata cara penagihan mengenai harga gas yaitu perusahaan memutuskan dalam USD/MMBTU dan Rp/M3 yang disebabkan melemahnya rupiah terhadap USD. Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan opininya bahwa harga Rp/M3 tersebut sebagai pergantian jasa yang dikenai PPN, sedangkan Perusahaan merasa harga tersebut adalah harga yang tidak dikenai dengan PPN (Wareza, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan bukti empiris

dampak GCG terhadap kinerja perusahaan dengan menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel pemoderasi. Indikator GCG dalam penelitian ini yaitu proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, proporsi kepemilikan institusional, dan jumlah komite audit karena indikator tersebut dapat menggambarkan GCG (Feviana & Supatmi, 2021). Kinerja perusahaan diukur dengan profitabilitas menggunakan rasio *return on asset* karena dalam penelitian Sulastri & Haki (2017) mengatakan bahwa profitabilitas dapat menjadi tolak ukur untuk melihat performa suatu perusahaan.

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor BUMN yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018–2020. Perusahaan BUMN adalah perusahaan milik pemerintah dengan kepemilikan saham minimal 51%. Oleh sebab itu, BUMN diharapkan memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat (Ferial *et al.*, 2016). Selain itu, para investor lebih tertarik berinvestasi pada perusahaan BUMN daripada perusahaan swasta karena mereka yakin perusahaan BUMN tidak akan melakukan *fraud* dan *dividen pay-out* yang diberikan lebih tinggi (Feviana & Supatmi, 2021). Perusahaan BUMN juga mendapatkan suntikan dana dari kementerian keuangan berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) yang tidak sedikit yaitu pada tahun 2017 yaitu Rp 9,2 triliun, tahun 2018 berjumlah Rp 3,6 triliun, kemudian pada tahun 2019 naik menjadi Rp 20,3 triliun. Namun, dengan mendapatkan suntikan dana tersebut ternyata tidak bisa membuat kinerja perusahaan menjadi baik, nyatanya pada tahun 2017 masih ada tujuh perusahaan BUMN yang merugi walau sudah mendapatkan suntikan dana pemerintah (Idris, 2019).

2. Pengembangan Hipotesis

Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja perusahaan

Dewan komisaris merupakan sebuah posisi yang bertugas dan memberikan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan dan memastikan *good corporate governance* telah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan (Lestari & Cahyonowati, 2017). Namun, dewan komisaris anggotanya terdiri dari dewan direksi dan pemegang saham sehingga pengawasan yang dilakukan dewan komisaris kurang optimal. Oleh sebab itu, tidak diperkenankan dewan komisaris independen berasal dari pemegang saham dan dewan direksi karena dewan komisaris

independen juga bisa sebagai penengah terhadap perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik perusahaan (Widagdo & Chariri, 2014).

Komisaris independen dapat mempengaruhi kinerja perusahaan karena komisaris independen dapat melaksanakan fungsi pengendalian perusahaan secara objektif dan independen sehingga dapat memastikan penyelenggaraan dan operasi perusahaan yang bersih. Penelitian Putri & Muid (2017) dan Andrean Agasva & Budiantoro (2020) dengan sampel perusahaan sektor manufaktur, menemukan hubungan yang positif antara proporsi dewan komisaris dan kinerja perusahaan. Temuan ini juga didukung Putra & Sumadi (2019) kinerja perusahaan dapat meningkat karena pengawasan oleh dewan komisaris independen semakin optimal ketika perusahaan memiliki banyak anggota komisaris independen. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini mengemukakan hipotesis:

H₁: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan

Kualitas Audit terhadap Kinerja Perusahaan

Kualitas audit merupakan hasil audit oleh tim auditor yang melakukan pemeriksaan secara sistematis yang berdampak pada sistem mutu perusahaan (Himawan & Emarila, 2010). Audit merupakan indikator yang penting dari perusahaan karena praktik GCG dapat didukung audit melalui pelaporan keuangan yang dapat disajikan secara transparansi dan meningkatkan kepercayaan pada laporan keuangan suatu perusahaan. Dalam menjaga kualitas audit, auditor harus memiliki sifat independensi karena akuntan publik harus memprioritaskan kepentingan publik daripada kepentingan pihak manajemen atau auditor itu sendiri (Meidona & Yanti, 2018). Kantor Akuntan Publik (KAP) *big four* diyakini mengeluarkan hasil audit yang lebih berkualitas dan minim kecurangan dalam mengaudit laporan keuangan dibandingkan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non big four* (Annisa & Kurniasih, 2012). Oleh sebab itu, jika *big four* mengaudit suatu perusahaan dan standar kualitas audit dapat terpenuhi, maka pelaporan keuangan akan lebih transparan dan kinerja perusahaan juga ikut membaik.

Temuan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Cahyonowati (2017) pada perusahaan manufaktur, menemukan adanya keterkaitan yang positif antara kualitas audit dan performa perusahaan. Hal serupa ditemukan oleh Mulyadi (2017) dengan sampel perusahaan sektor perbankan, dan mengemukakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan. Lebih

lanjut, penelitian Meidona dan Yanti (2018) pada perusahaan indeks LQ45, menemukan keterkaitan yang positif antara kualitas audit dengan kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini mengemukakan hipotesis:

H₂: Kualitas audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan

Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan

Proporsi kepemilikan akan saham perusahaan oleh organisasi atau lembaga maupun institusi lain diartikan sebagai kepemilikan institusional (Bakhtiar *et al.*, 2021). Kepemilikan institusional dalam jumlah besar akan memberikan dampak pengawasan terhadap manajemen menjadi lebih ketat sehingga pemanfaatan aktiva perusahaan menjadi lebih efisien dan juga sebagai antisipasi yang akan dilakukan oleh manajemen yaitu pemborosan (Anjani & Yadnya, 2017). Adanya kepemilikan institusional juga dapat menjawab pernyataan Jensen & Meckling (1976) dalam teori agensi yaitu dengan pengawasan yang ketat oleh kepemilikan institusional akan membuat kepentingan manajer dan pemegang saham menjadi setara sehingga dapat meminimalisir masalah agensi.

Temuan penelitian Lestari dan Juliarto (2017) dengan sampel perusahaan sektor manufaktur membuktikan bahwa kepemilikan institusional mampu memberikan efek positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil serupa ditemukan oleh Khamis *et al* (2015) di Bahrain, terdapat keterkaitan yang positif antara kepemilikan institusional terhadap performa perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini mengemukakan hipotesis:

H₃: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan

Jumlah Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan

Komite yang dipilih dan memiliki tanggung jawab terhadap dewan komisaris serta bertugas mengamati proses pelaporan keuangan dan pengawasan internal disebut dengan komite audit (Jemunu *et al.*, 2021). Komite audit memiliki tugas untuk memastikan prosedur perusahaan diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap pengawasan pada benturan kepentingan dan kecurangan praktek kolusi antara manajemen dengan auditor (Tandean, 2016). Dalam keputusan BAPEPAM Nomor 643 Tahun 2012 mengemukakan bahwa komite audit harus terdiri dari minimal 3 anggota yang merupakan

komisaris independen atau pihak lain dari luar perusahaan. Oleh karena itu, fungsi pengawasan terhadap pelaporan keuangan yang dilakukan komite audit semakin optimal jika komite audit yang dimiliki perusahaan lebih banyak dari peraturan yang ada sehingga dapat memberikan perlindungan kepada para pemangku kepentingan dan dapat memberikan dampak pada peningkatan kinerja perusahaan (Lestari & Cahyonowati, 2017).

Hasil penelitian Tandean (2016) dengan sampel perusahaan manufaktur di Indonesia membuktikan bahwa pengendalian kebijakan keuangan perusahaan akan lebih optimal jika terdapat lebih banyak komite audit yang bekerja untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam perusahaan. Hasil ini didukung juga oleh Mulyadi (2017) bahwa terdapat keterkaitan yang positif antara komite audit dan performa perusahaan karena pengawasan oleh komite audit semakin optimal ketika perusahaan memiliki banyak anggota komite audit. Hal serupa dibuktikan oleh Venno (2015) pada perusahaan *go public*, bahwa komite audit berperan penting dalam membuat perusahaan lebih transparan dan dapat diandalkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini mengemukakan hipotesis:

H₄: Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan

GCG Terhadap Kinerja Perusahaan dengan Penghindaran Pajak sebagai pemoderasi

Kinerja perusahaan dapat dipengaruhi oleh GCG karena GCG dapat mengatasi permasalahan agensi. Masalah agensi dapat muncul karena manajer tidak maksimal dalam mencari keuntungan dan hanya memaksimalkan kepentingan diri sendiri (Putra & Sumadi, 2019). GCG juga mampu meningkatkan kinerja perusahaan melalui kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip yang dianut yaitu akuntabilitas, transparansi, kemandirian, kewajaran, dan pertanggungjawaban (Rahmadani & Rahayu, 2020). Oleh karena itu, perusahaan yang benar-benar menerapkan segala prinsip GCG seharusnya dapat meminimalisir perilaku yang dapat merugikan para *stakeholder*, salah satunya penghindaran pajak (Wibawa *et al.*, 2016)

GCG yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Markonah *et al.*, 2016). Lebih lanjut disampaikan bahwa mekanisme GCG melalui proporsi komisaris independen, kualitas audit, proporsi kepemilikan institusional, dan jumlah komite audit, dapat menciptakan suatu pengawasan terhadap manajer

untuk mencapai tujuan perusahaan. Namun, pengaruh tersebut dapat melemah jika perusahaan melakukan penghindaran pajak. Penerapan GCG yang baik melalui mekanisme jumlah anggota komite independen dan komite audit yang banyak, audit yang berkualitas, maupun kepemilikan saham oleh institusi yang tinggi tidak akan berdampak maksimal terhadap kinerja perusahaan apabila perusahaan juga melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan praktik yang berisiko jika terdeteksi otoritas fiskal karena dapat menyebabkan hukuman, terhentinya peningkatan kewajiban pajak, dan rusaknya citra perusahaan (Hanlon & Slemrod, 2009). Penghindaran pajak menjadikan peluang bagi manajer untuk melakukan tindakan oportunistik dan masalah keagenan sehingga dapat menyebabkan menurunnya transparansi dan kinerja perusahaan (Kartikaningdyah & Putri, 2017). Dengan demikian, penghindaran pajak dapat memperlemah pengaruh positif GCG terhadap performa perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini mengemukakan hipotesis:

- H₅: Penghindaran pajak memperlemah pengaruh positif proporsi dewan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan.
H₆: Penghindaran pajak memperlemah pengaruh positif kualitas audit terhadap kinerja perusahaan
H₇: Penghindaran pajak memperlemah pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan
H₈: Penghindaran pajak memperlemah pengaruh positif jumlah komite audit terhadap kinerja perusahaan

3. Data dan Metode

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan penelitian ini merupakan perusahaan BUMN yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria dalam tabel 1.

Tabel 1. Penentuan Sampel Perusahaan

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan BUMN yang tergabung dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020	20
2	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan periode 2016-2020	(0)
3	Perusahaan yang tidak mengalami keuntungan selama rentang periode 2016-2020	(7)
	Jumlah sampel akhir(i)	13
	Jumlah Tahun(t)	5
	Jumlah pengamatan(i*t)	65

Kriteria perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan selama periode 2016-2020 supaya memiliki data yang konsisten sehingga dapat digunakan untuk uji pengaruh GCG terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini juga menggunakan objek perusahaan yang mengalami keuntungan, untuk mendapatkan data beban pajak dan untuk menghindari perusahaan yang mendapatkan kompensasi pajak. Perusahaan yang mengalami kerugian selama rentang periode penelitian ini adalah PT Indofarma Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Timah Tbk, PT Waskita Karya Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk, PT Krakatau Steel Tbk, dan PT Jasa Marga Tbk.

Jenis dan Sumber Data

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan perusahaan BUMN tercatat pada BEI tahun 2016-2020. Teknik

pengumpulan data penelitian ini dengan mengidentifikasi laporan tahunan perusahaan BUMN yang dapat diakses melalui *website* www.idx.co.id atau *website* perusahaan.

Pengukuran Variabel Penelitian

Kinerja perusahaan (KP) sebagai variabel dependen yang dapat diprosikan melalui ROA (Sulastri & Haki, 2017). ROA dapat dihitung dengan pembagian antara laba bersih dan total aset.

GCC digunakan dalam penelitian ini sebagai variabel independen yang diukur dengan 4 indikator, yaitu: 1) Dewan Komisaris Independen (DK). Bagian dari dewan komisaris yang anggotanya tidak berasal dari pemegang saham dan dewan direksi disebut dengan dewan komisaris independen (Widagdo & Chariri, 2014). Perhitungan dewan komisaris independen dilakukan dengan membagi jumlah komisaris dari luar perusahaan dan total komisaris (Fadillah, 2017). 2) Kualitas Audit (QA). Pemeriksaan secara sistematis yang memiliki

dampak pada sistem mutu perusahaan disebut dengan kualitas audit (Himawan & Emarila, 2010). Kualitas audit ditunjukkan dalam penelitian ini dengan melihat KAP yang mengaudit perusahaan. Variabel ini diukur dengan *dummy*, ketika laporan keuangan perusahaan diaudit oleh KAP *big four* maka akan diberikan nilai 1 dan 0 jika sebaliknya (Meidona & Yanti, 2018). 3) Kepemilikan Institusional (KI). Persentase dari kepemilikan saham perusahaan oleh institusi lain disebut dengan kepemilikan institusional (Fadillah, 2017). Perhitungan kepemilikan institusional dapat dilakukan dengan membagi jumlah saham yang dimiliki institusi dengan total saham yang beredar (Fiyati & Noegroho, 2021). 4) Komite Audit (KA). Komite yang dipilih dan memiliki tanggung jawab terhadap dewan komisaris serta dapat memberikan tanggung jawabnya dalam mengawasi prosedur pelaporan keuangan dan pengawasan internal disebut dengan komite audit (Annisa & Kurniasih, 2012). BAPEPAM Nomor 634 Tahun 2012 menyatakan bahwa komite audit harus terdiri dari minimal 3 anggota yang merupakan komisaris independen atau pihak lain dari luar perusahaan. Perhitungan komite audit dilakukan dengan membagi jumlah komite audit perusahaan dan jumlah komite audit berdasar BAPEPAM (Fiyati & Noegroho, 2021)

Penghindaran pajak (CETR) yang digunakan dalam variabel pemoderasi dapat dihitung dengan rumus *cash effective tax ratio* (CETR) yaitu *current tax expense* dibagi dengan *pre-tax expense* (Novitasari & Suharni, 2019). Jadi, semakin rendah nilai CETR perusahaan berarti semakin tinggi perusahaan diindikasikan melakukan penghindaran pajak karena *current tax expense* yang dibayarkan perusahaan rendah jika dibandingkan dengan *pre-tax expense* perusahaan. Oleh karena itu, pengukuran penghindaran pajak selanjutnya akan dihitung dengan 1-CETR sehingga akan dimaknai bahwa semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin tinggi juga indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Penelitian menggunakan tiga variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, dan kondisi pandemi covid-19. Ukuran perusahaan (UP) diukur melalui natural logaritma dari total aset dan *leverage* (LV) dihitung menggunakan *debt to equity ratio* dengan membagi antara jumlah utang dan total ekuitas (Azis & Hartono, 2017). Variabel *dummy* dalam penelitian ini juga digunakan sebagai variabel kontrol dengan memberikan nilai 0 untuk laporan tahunan 2018 dan 2019, lalu nilai 1 pada

penggunaan laporan tahunan 2020 untuk tahun pandemi COVID-19 (TC).

Teknik Analisis

Teknik dalam penelitian ini adalah *cross-section weights* yang digunakan untuk pengujian hipotesis dan diolah dengan program EViews 10. Untuk uji hipotesis, penelitian ini menggunakan metode data panel *cross-section weight*. Uji ini dilakukan untuk mengurangi heteroskedastisitas antara unit *cross section*, penggunaan model ini juga tepat untuk melihat perubahan data dari masing-masing variabel sehingga data akan lebih dinamis (Prasanti *et al* 2015). Uji hipotesis diuji dengan persamaan matematis sebagai berikut:

Persamaan regresi tanpa ada moderasi (1)

$$KPit = \alpha_0 + \alpha_1 DKit + \alpha_2 QAit + \alpha_3 Klit + \alpha_4 KAit + \alpha_5 LVit + \alpha_6 UPit + \alpha_7 TCit + \epsilon it$$

Persamaan regresi dengan moderasi (2)

$$KPit = \beta_0 + \beta_1 DKit + \beta_2 QAit + \beta_3 Klit + \beta_4 KAit + \beta_5 DKit * CETRit + \beta_6 QAit * CETRit + \beta_7 Klit * CETRit + \beta_8 KAit * CETRit + \beta_9 LVit + \beta_{10} UPit + \epsilon it$$

Kriteria penerimaan H_1, H_2, H_3 , dan H_4 bahwa GCG berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, didasarkan pada persamaan regresi tanpa moderasi (persamaan 1) pada tingkat signifikansi 5% dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

$$H_0: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5 \leq 0$$

$$H_a: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5 > 0$$

Kriteria penerimaan H_5, H_6, H_7 , dan H_8 bahwa penghindaran pajak dapat memperlemah pengaruh positif GCG terhadap kinerja perusahaan, didasarkan pada perbandingan nilai *adjusted R²* persamaan regresi tanpa moderasi (persamaan 1) yang lebih besar dari nilai *adjusted R²* persamaan regresi dengan moderasi (persamaan 2). Di samping itu, dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

$$H_0: \beta_6, \beta_7, \beta_8, \beta_9, \beta_{10} \geq 0$$

$$H_a: \beta_6, \beta_7, \beta_8, \beta_9, \beta_{10} < 0$$

4. Hasil

Statistik Deskriptif

Statistika deskriptif pada penelitian ini digambarkan dengan nilai rata-rata, nilai minimal, nilai maksimal dan standar deviasi pada setiap va-

riabel. Hasil statistika deskriptif dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Penelitian

Variabel Penelitian	N	Rerata	Min	Maks.	Std. Deviasi
ROA	65	0,043	0,001	0,212	0,051
DK	65	0,423	0,200	0,625	0,115
KI	65	0,314	0,052	0,490	0,118
KA	65	1,492	1,000	2,667	0,438
CETR	65	0,721	0,273	0,993	0,179
UP	65	13,925	12,640	15,179	0,754
LV	65	3,247	0,400	16,079	3,265
Variabel Penelitian				Jumlah	Proporsi
Kualitas Audit (QA)					
KAP big 4 (1)				42	64,6%
Non KAP big 4 (0)				23	35,4%
Tahun Covid (TC)					
Laporan Tahunan 2020 (1)				13	20%
Non Laporan Tahunan 2020 (0)				52	80%

Keterangan: ROA: *Return On Asset*; DK: Dewan Komisaris Independen; QA: Kualitas Audit; KI: Kepemilikan Instiusional; KA: Komite Audit; CETR: Penghindaran Pajak; UP: Ukuran Perusahaan; LV: *Leverage*; TC: Tahun Pandemi COVID-19.

Kinerja BUMN selama tahun 2016-2020 yang diprosikan dengan ROA memiliki nilai rata-rata sebesar 0,043 yang berarti perusahaan BUMN sudah dapat menghasilkan laba bersih rata-rata sebesar 4,3% dari memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Terkait dengan tata kelola BUMN, sebagian besar dewan komisaris BUMN lebih bersifat tidak independen dan sebagian besar laporan keuangannya diaudit oleh KAP Big Four yaitu sebanyak 64,6%. Sementara itu, kepemilikan institusional pada perusahaan BUMN rendah, yaitu rata-rata hanya sebesar 31,4% dan seluruh perusahaan BUMN sudah memenuhi aturan dari kriteria komite audit yang dikeluarkan oleh BAPEPAM Nomor 634 Tahun 2012, yaitu minimal 3 anggota yang merupakan komisaris independen atau pihak lain dari luar perusahaan.

Semakin tinggi nilai CETR perusahaan, semakin tinggi perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak (CETR) memiliki nilai rata-rata 0,721 sehingga dapat disimpulkan sebagian besar perusahaan BUMN terindikasi melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan tabel 2 juga ditemukan secara rata-rata pembiayaan BUMN lebih didominasi oleh utang dari pada ekuitas dan memiliki aset rata-rata senilai Rp 309 triliun. Penggunaan *dummy* pada laporan tahun COVID-19 adalah penggunaan laporan tahunan pada tahun 2020.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan model *cross-section weights* yang

dapat dilihat pada tabel 3. Berdasarkan ringkasan hasil pengujian tabel 3 nilai Adjusted R² untuk model 1 adalah 0,39. Hal ini mengindikasikan bahwa 39% variasi dari kinerja perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu *Good Corporate Governance (GCG)*, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *dummy* dari penggunaan laporan tahunan pada tahun 2020. Sisanya 61% dapat dijelaskan oleh faktor di luar model. Kemudian, model 2 memiliki nilai Adjusted R² sebesar 0,49. Hal itu berarti semua variabel independen yaitu GCG, penghindaran pajak, interaksi antara GCG dengan penghindaran pajak, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *dummy* mampu menjelaskan proporsi dari kinerja perusahaan terhadap rata-ratanya 49,3% dan sisanya 50,7% dijelaskan variabel diluar persamaan ini. Nilai F-Statistic untuk pengujian ini ditemukan signifikansi pada tingkat signifikansi 1%. Hal ini berarti pada penelitian ini variabel independen yang digunakan berpengaruh terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, berdasarkan nilai Adjusted R² dan F-Statistic dapat disimpulkan bahwa secara statistik model penelitian ini layak digunakan.

Hasil uji-t pada table 3 diperoleh informasi bahwa koefisien regresi kualitas audit dan proporsi jumlah komite audit menunjukkan arah positif dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 sedangkan dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional menunjukkan tingkat signifikansi lebih dari 0,05. Dengan demikian hipotesis 2 dan hipotesis 4 diterima, yaitu kualitas audit dan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja

perusahaan. Namun, hipotesis 1 dan hipotesis 3 tidak terdukung, yaitu dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berdampak positif terhadap performa perusahaan.

Tabel 3. Hasil pengujian hipotesis

Variabel	Kinerja Perusahaan (ROA)			
	Model 1		Model 2	
	Koefisien Regresi	Prob	Koefisien Regresi	Prob
Konstanta	0,244	0,003	0,291	0,016
DK	0,009	0,389	-0,133	0,113
QA	0,012	0,028	0,054	0,148
KA	0,021	0,007	-0,014	0,353
KI	0,029	0,083	0,209	0,029
CETR			0,105	0,162
DK*CETR			0,191	0,114
QA*CETR			-0,053	0,219
KA*CETR			0,058	0,108
KI*CETR			-0,253	0,035
UP	-0,017	0,009	-0,027	0,000
LV	-0,004	0,001	-0,003	0,004
TC	-0,013	0,008	-0,004	0,221
R ²	0,456		0,588	
Adjusted R ²	0,390		0,493	
F-Statistic	6,836	0,000	6,185	0,000

Berdasarkan model 2, penghindaran pajak terbukti tidak memoderasi pengaruh positif dewan komisaris independen, kualitas audit dan jumlah komite audit terhadap kinerja perusahaan. Namun, penghindaran pajak memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Berdasarkan tabel 3 ditemukan nilai koefisien regresi variabel KI (kepemilikan institusional) sesudah moderasi (0,209) lebih besar dibandingkan sebelum moderasi (0,029). Demikian halnya nilai nilai Adjusted R² model 2 (setelah moderasi) sebesar 0,493 lebih besar dari model 1 (sebelum moderasi) sebesar 0,390. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak bukan memperlemah pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan tetapi memperkuat pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Dengan demikian hipotesis 5 hingga hipotesis 8 dalam penelitian ini tidak terdukung namun ada temuan bahwa penghindaran pajak memperkuat pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan.

Pada variabel kontrol berdasarkan model 1 diperoleh informasi bahwa ukuran perusahaan, leverage, dan kondisi pandemi ditemukan berpe-

ngaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Namun, pada model 2 hanya ukuran perusahaan dan leverage yang ditemukan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, sedangkan kondisi pandemi terbukti tidak memengaruhi kinerja perusahaan.

5. Pembahasan

Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Perusahaan

Hasil analisis ditemukan proporsi dewan komisaris independen tidak berdampak positif terhadap performa perusahaan. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori agensi karena dewan komisaris independen belum dapat memidiasi kepentingan manajemen dan pemilik perusahaan. Berdasarkan profil dewan komisaris, beberapa dewan komisaris independen BUMN merupakan mantan pejabat negara seperti menteri, sehingga meskipun posisi mereka sebagai komisaris independen namun posisi/jabatan masa lalu yang adalah pejabat negara, bisa menyebabkan mereka tidak independen seutuhnya.

Pengangkatan dewan komisaris independen diduga hanya untuk pemenuhan regulasi, sehingga dewan komisaris independen pada perusahaan belum dapat menegakkan GCG dan fungsi kontrol yang sesuai. Selain itu, dewan komisaris independen juga tidak menggunakan hak independensinya untuk mengawasi keputusan direksi tetapi hanya sebagai bentuk formalitas untuk memenuhi aturan dan tidak berdampak pada kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sependapat dengan Putri & Muid (2017) yang mengemukakan dewan komisaris independen memiliki keterkaitan yang positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini sepemikiran dengan Widagdo & Chariri (2014) dan Anjani & Yadnya (2017) yang menyatakan dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Kualitas Audit terhadap Kinerja Perusahaan

Hasil analisis ditemukan kualitas audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan sehingga semakin tinggi kualitas audit maka perusahaan cenderung memiliki kinerja yang meningkat. Hasil penelitian ini mendukung teori agensi bahwa Kantor Akuntan Publik(KAP) *big four* mampu menjaga sifat independensinya dengan tetap profesional dalam melakukan audit pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dan dapat mengesampingkan kepentingan manajemen dan audi-

tor itu sendiri. Hasil audit dari KAP *bigfour* juga akan meminimalisir tindakan kecurangan dan meningkatkan kredibilitas informasi keuangan suatu perusahaan sehingga dapat mendukung praktik GCG melalui transparansi pelaporan keuangan sehingga kinerja perusahaan dapat menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan pemikiran Mulyadi (2017) dan Lestari & Cahyonowati (2017) yang menyatakan kualitas audit dapat berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Andrean Agasva & Budi-antoro (2020) yang menyatakan kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan

Hasil analisis menunjukkan bahwa makin tinggi atau rendah kepemilikan institusional perusahaan tidak berdampak terhadap performa perusahaan. Kepemilikan institusional pada perusahaan BUMN rendah, yaitu rata-rata hanya sebesar 31,4%, diduga menjadikan peran kepemilikan institusional sebagai penengah antara kepentingan pemegang saham dan manajer tidak dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan data pemegang saham, kepemilikan institusional di BUMN terdiri dari institusi swasta dan asing yang hanya memiliki kepemilikan saham rendah sehingga tidak mampu memberikan tekanan yang besar terhadap manajer dan membuat keputusan yang diambil manajer dapat berdampak baik terhadap kinerja perusahaan. Hal ini juga berarti kepemilikan institusional di BUMN tidak melakukan fungsinya yaitu melakukan pengawasan terhadap manajer, tetapi hanya bergantung pada keputusan manajer dan tidak memberikan masukan terhadap manajer perusahaan.

Hasil penelitian ini sepemikiran dengan temuan penelitian Nugroho & Widiasmara (2019) dan Anjani & Yadnya (2017) yang menyatakan kepemilikan institusional tidak memiliki dampak terhadap kinerja perusahaan. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan Lestari & Juliarto (2017) yang menyatakan ada keterkaitan yang positif antara kepemilikan institusional dan performa perusahaan.

Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan

Hasil analisis menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini berarti semakin banyak anggota komite audit perusahaan semakin baik pengawasan yang dilakukan komite audit terutama dalam pelaporan laporan keuangan mampu mencegah terjadinya benturan kepentingan dan praktik kolusi

antara manajemen dan auditor sehingga mendongkrak kinerja perusahaan.

Dengan adanya komite audit pada perusahaan setidaknya minimal 3 orang berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM Nomor 634 Tahun 2012, maka pengawasan yang dilakukan komite audit semakin optimal dan dapat menyebabkan pada peningkatan pada kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ferial *et al* (2016) dan Anjani & Yadnya (2017) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap performa perusahaan. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan Azis & Hartono (2017) yang menyatakan komite audit tidak memiliki keterkaitan yang positif terhadap performa perusahaan.

GCG Terhadap Kinerja Perusahaan dengan Penghindaran Pajak sebagai pemoderasi

Hasil penelitian menunjukkan penghindaran pajak memperlemah pengaruh positif *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja perusahaan. Aspek GCG dalam penelitian ini menggunakan variabel dewan komisaris independen, kualitas audit, kepemilikan institusional, dan komite audit. Berdasarkan hasil analisis, interaksi antara penghindaran pajak dengan aspek CGC terkait dewan komisaris independen (DKI*CETR), kualitas audit (QA*CETR), dan komite audit (KA*CETR) menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak memoderasi pengaruh dewan komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit terhadap kinerja perusahaan.

Sementara itu, interaksi antara penghindaran pajak dengan aspek CGC terkait kepemilikan institusional (KI*CETR) menunjukkan penghindaran pajak memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan besaran nilai koefisien regresi untuk KI*CETR dan nilai Adjusted R² model 2 (dengan moderasi) lebih besar daripada model 1 (tanpa moderasi) sehingga penghindaran pajak ditemukan memperkuat pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Penghindaran pajak memoderasi hubungan tersebut secara parsial, bukan full moderasi, karena penghindaran pajak ditemukan juga memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan pada model 2 (setelah moderasi).

Penghindaran pajak memperkuat pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan, jadi kepemilikan institusional yang tinggi dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Penghindaran pajak bisa menjadi alternatif bagi perusahaan untuk

meminimalisir beban pajak dan membuat kinerja perusahaan menjadi meningkat. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung teori agensi dengan ditemukan temuan bahwa penghindaran pajak terbukti tidak dapat memoderasi dan memperlemah pengaruh positif dewan komisaris independen, kualitas audit dan proporsi komite audit terhadap kinerja perusahaan. Hal ini diduga karena penghindaran pajak merupakan hal yang legal bagi perusahaan, penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan BUMN juga tidak melakukan pelanggaran transaksi, tetapi dengan cara mencari celah terhadap peraturan perpajakan dan itu dianggap sah-sah saja bagi perusahaan. Dugaan lainnya bisa saja karena praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan BUMN penelitian ini rendah, karena perusahaan BUMN diharapkan dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain (Non-BUMN) dalam hal kepatuhan pajak terhadap pemerintah. Oleh karena itu, hipotesis lima hingga delapan pada penelitian ini tidak dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan Fiyati & Noegroho (2021) yang menyatakan penghindaran pajak tidak dapat memoderasi pengaruh GCG terhadap kinerja perusahaan.

6. Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas audit dan proporsi jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sementara itu, penghindaran pajak ditemukan memperkuat pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Hasil pengujian dan analisis menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak dapat memperlemah pengaruh positif GCG terkait dewan komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit, terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris terkait teori agensi pada perusahaan BUMN dalam hal pengaruh GCG yang menggunakan variabel kualitas audit dan proporsi komite audit dapat mengatasi masalah keagenan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan pemegang kepentingan perusahaan. Penelitian ini dapat juga memberikan saran bagi perusahaan BUMN untuk meningkatkan dan konsisten pada praktik GCG dan juga pengelolaan perpajakannya.

Bagi investor, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan investasi pada perusahaan BUMN karena praktik penghindaran pajak perusahaan BUMN yang rendah. Kemudian bagi regulator khususnya OJK dan Kementerian BUMN penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentang tata kelola dan pengelolaan perpajakannya pada sektor BUMN.

Saran

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah penggunaan perusahaan sektor BUMN sebagai objek dalam penelitian ini yang mengabaikan kebijakan khusus dan tekanan investor yang berbeda pada perusahaan sektor BUMN, sehingga saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk memperluas sampel penelitian dengan menggunakan sampel perusahaan sektor lain. Selain itu, jika tetap ingin menggunakan variabel GCG, dapat mempertimbangkan untuk menggunakan indikator yang berbeda yang dapat menjelaskan variabel-variabel terkait GCG lainnya, seperti jumlah kehadiran rapat komisaris dan jumlah rapat komite audit.

Daftar Pustaka

- Al-ahdal, W. M., Alsamhi, M. H., Tabash, M. I., & Farhan, N. H. S. (2020). The Impact of Corporate Governance on Financial performance of Indian and GCC listed firms: An empirical investigation. *Research in International Business and Finance*, 51(August 2019), 101083. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.101083>
- Andreas Agasva, B., & Budiantoro, H. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2017). *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)*, 5(1), 33-53. <https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v5i1.1403>
- Anjani, L., & Yadnya, I. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI. *Manajemen Unud*, 6(11), 254710.
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(2), 95-139.
- Azis, A., & Hartono, U. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Struktur Modal, Dan

- Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 5(3), 1-13.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (2012). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No: KEP-643/BL/2012*. 1-5.
- Bakhtiar, H. A., Nurlaela, S., & Hendra, K. (2021). Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Nilai Perusahaan. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(2), 136-142. <https://doi.org/10.26905/afr.v3i2.3927>
- Darmawan, I. G. H., & Surakartha, I. M. (2014). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1), 143-161. <https://doi.org/10.26623/slsi.v18i2.2296>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *Quarterly Journal of Finance*, 10(2), 537-546. <https://doi.org/10.1142/S2010139220500081>
- Fadillah, A. R. (2017). Analisis Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan Yang Terdaftar di LQ45. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 37-52. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak>
- Ferial, F., Suhadak, S., & Handayani, S. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan dan Efeknya Terhadap Nilai Perusahaan (studi pada BUMN yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2012-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 33(1), 146-153.
- Feviana, D. L., & Supatmi, S. (2021). Good Corporate Governance Effects Company Value With Earnings Management as Intervening Variables in BUMN. *International Journal of Social Science and Business*, 5(1). <https://doi.org/10.23887/ijssb.v5i1.31530>
- Fiyati, U., & Noegroho, Y. A. K. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan dengan Penghindaran Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah MEA*, 5(1), 357-379.
- Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What Does Tax Aggressiveness Signal? Evidence From Stock Price Reactions to News About Tax Shelter Involvement. *Journal of Public Economics*, 93(1-2), 126-141. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.09.004>
- Hapsari, D. P. (2019). Analisis Implementasi Penerapan Prinsip - Prinsip Good Corporate Governance dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan Pt Ns Bluescope Indonesia. *TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1), 33-49. <https://doi.org/10.22441/tekun.v8i1.5523>
- Himawan, A., & Emarila, R. (2010). Pengaruh Persepsi Auditor Atas Kompetensi, Independensi, dan Kualitas Audit Terhadap Umur Kantor Akuntan Publik di Jakarta. *ESENSI*, 13(3), 19-46.
- Idris, M. (2019). *Daftar 7 BUMN Yang Tetap Rugi Meski Sudah Disuntik PMN*. Kompas. <https://money.kompas.com/read/2019/12/21/142657926/daftar-7-bumn-yang-tetap-rugi-meski-sudah-disuntik-pmn?page=all>
- Jemunu, M. D., Apriyanto, G., & Parawiyati, P. (2021). Good Corporate Governance, Pengungkapan Sustainability Report dan Manajemen Laba terhadap Nilai Perusahaan. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(2), 93-102. <https://doi.org/10.26905/afr.v3i2.5195>
- Jensen, M. ., & Meckling, W. . (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics* 3, 72(10), 1671-1696. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kartikaningdyah, E., & Putri, R. N. (2017). Pengaruh Tax Avoidance dan Board Diversity Terhadap Kinerja Perusahaan Dalam Perspektif Corporate Governance. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 2(2), 114-122.
- Khamis, R., Hamdan, A. M., & Elali, W. (2015). The Relationship Between Ownership Structure Dimensions and Corporate Performance: Evidence from Bahrain. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 9(4), 38-56. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v9i4.4>
- Lestari, N. P., & Juliarto, A. (2017). Pengaruh Dimensi Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 742-751.
- Lestari, P. P., & Cahyonowati, N. (2017). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia Tahun 2013-2016). *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(4), 548-555.

- Markonah, Cahaya, Y. F., & Riwayati, H. E. (2016). The Effect of Banking Company Performance toward Good Corporate Governance Listed in Indonesia stock exchange. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 486-492. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.024>
- Meidona, S., & Yanti, R. (2018). Pengaruh Corporate Governance dan Kualitas Audit Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Indovisi*, 1(1), 67-82.
- Mulyadi, R. (2017). Pengaruh karakteristik komite audit dan kualitas audit terhadap profitabilitas Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 22-35.
- Novitasari, M., & Suharni, S. (2019). Implikasi Indikator Keuangan Terhadap Tax Avoidance. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(1), 16-23. <https://doi.org/10.26905/afr.v2i1.3177>
- Nugroho, R. M., & Widiasmara, A. (2019). Pengaruh Dewan Direksi Berdasarkan Gender, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Profitabilitas Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Periode 2015-2017. *Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi I*, 356-371.
- Prasanti, tyas ayu, Wuryandari, T., & Rusgiyono, A. (2015). Aplikasi Regresi Data Panel Untuk Pemodelan Tingkat Pengangguran Terbuka kabupaten/kota di provinsi jawa tengah. *Jurnal Gaussian*, 4(2001), 687-696.
- Putra, R., & Sumadi, S. (2019). Peran Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.25273/jap.v8i1.3400>
- Putri, R. K., & Muaid, D. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 6(3), 1-9.
- Rahmadani, F. D., & Rahayu, S. M. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan. *Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Akuntansi & Manajemen*, 1(2), 113-123. <https://doi.org/10.37577/ekonam.v1i2.216>
- Rimardhani, H., R. Rustam, H., & Dwiatmanto. (2018). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas perusahaan. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 12(1), 54-58. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v12i1.15>
- Sulastri, E. M., & Hakip, N. D. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja dan Nilai Perusahaan (studi pada perusahaan yang terindeks oleh CGPI). *Jurnal Manajemen Dan Sistem Informasi*, 2(2), 35-45.
- Tandean, V. A. (2016). Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Pengaruhnya Pada Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 11(1), 54-62. <https://doi.org/10.24843/jiab.2016.v11.i01.p07>
- Veno, A. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Go Public. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 19(1), 95-112. <https://doi.org/10.20473/jeba.v28i12018.57-73>
- Wareza, M. (2021). Erick Turun Tangan, Begini Kronologi Kasus Pajak PGN Rp 6,8 T. CNBC. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210105094526-17-213520/erick-turun-tangan-begini-kronologi-kasus-pajak-pgn-rp-68-t>
- Wibawa, A., Wilopo, & Abdillah, Y. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (studi pada perusahaan terdaftar di indeks bursa sri kehati tahun 2010-2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1), 1-9.
- Wicaksono, A. (2021). DPR Bongkar Modus Kemplang Pajak Rp10 T Pakai Cap KRAS. CNN. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210324142216-92-621504/dpr-bongkar-modus-kemplang-pajak-rp10-t-pakai-cap-kras>
- Widagdo, D. O. K., & Chariri, A. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4(3), 67-77.